




Analisis Putusan PHP-Kada 2025

Pertimbangan Hukum, PSU dan Koreksi Pelaksanaan Pilkada 2024

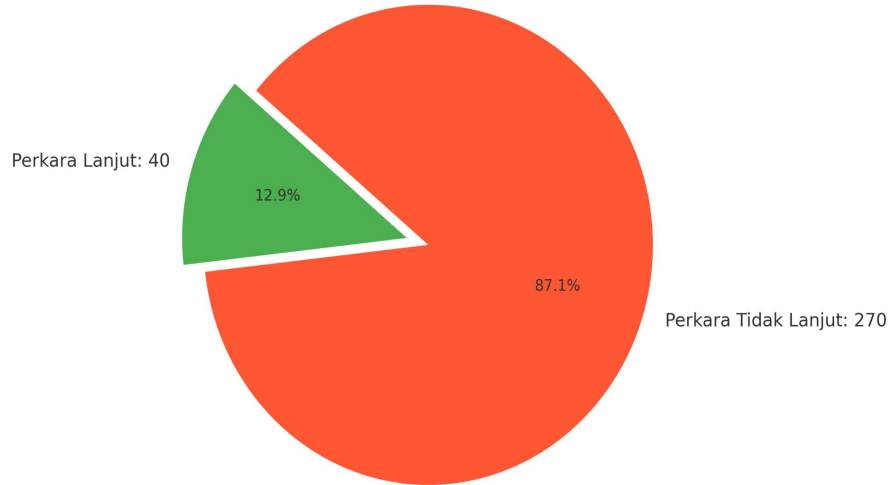
Oleh: Tim Peneliti Perludem

Catatan Umum

- Mahkamah Konstitusi berhasil menyelesaikan seluruh proses persidangan PHP-Kada 2025 kurang dari 45 Hari Kerja sebagaimana waktu yang ditetapkan oleh UU Pilkada
 - Proses pembuktian perkara dalam sidang PHP-Kada 2025 berjalan cukup lancar, meskipun jumlah ahli dan saksi yg diperkenankan relatif terlalu sedikit
 - Durasi persidangan dapat dikelola dengan baik, sehingga hanya pada momentum tertentu saja MK harus bersidang hingga larut malam.
 - Sarana keterbukaan informasi yang disediakan MK juga semakin baik, dengan pembaruan informasi yang sangat cepat
- 

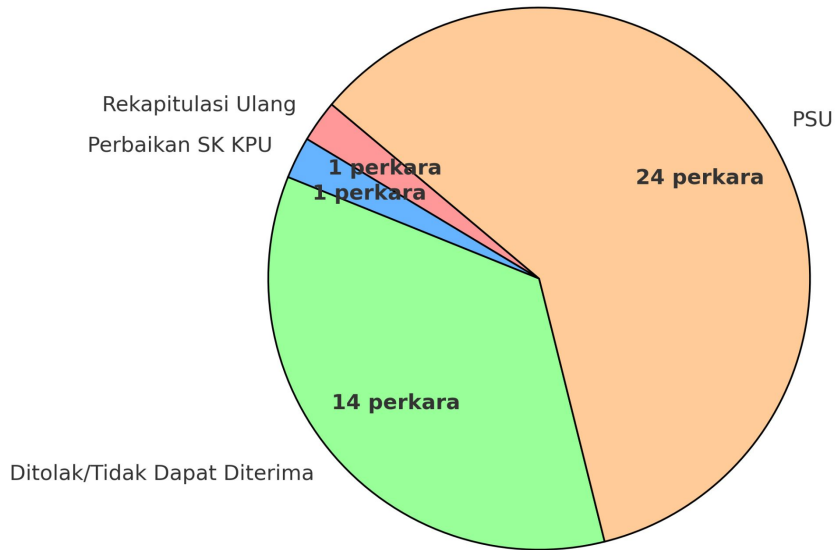
Rekapitulasi Perkara

Rekapitulasi Perkara PPHU Pilkada 2024



Dari total 310 perkara sebanyak 270 perkara tidak dapat lanjut. Rinciannya: sebanyak 227 perkara dinyatakan tidak dapat diterima, 29 perkara ditarik kembali, 8 perkara gugur, dan 6 perkara dinyatakan MK tidak berwenang.

Putusan PHP-Kada 2025 berdasarkan Amar



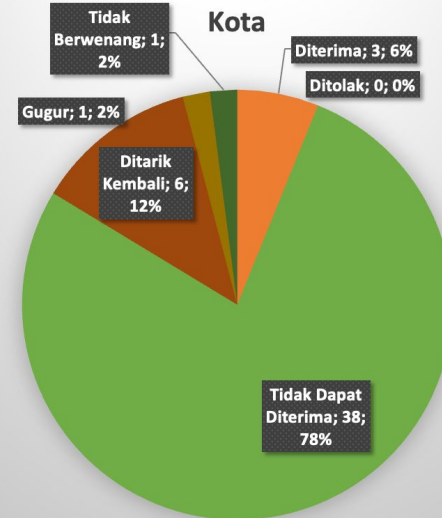
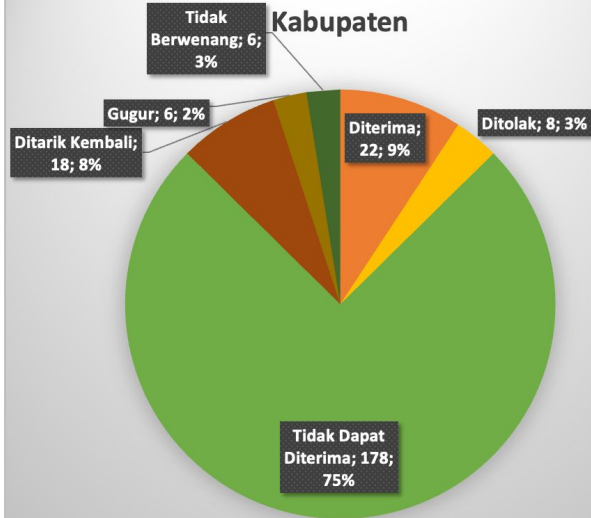
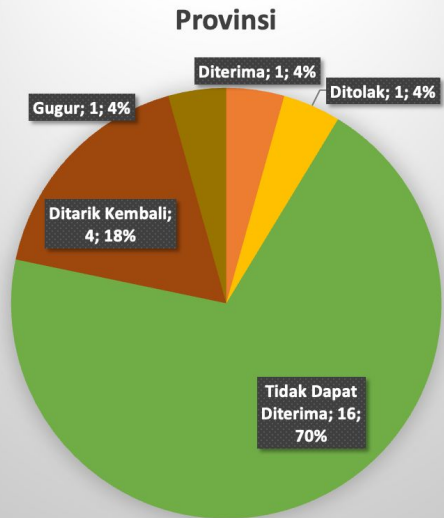
- 14 kasus PSU di seluruh TPS dengan batas waktu antara 60 hari-180 hari
- 8 kasus PSU di TPS tertentu dengan batas waktu 30-45 hari
- 2 kasus PSU di satu atau beberapa kecamatan dengan batas waktu 45 hari

Sebaran PSU

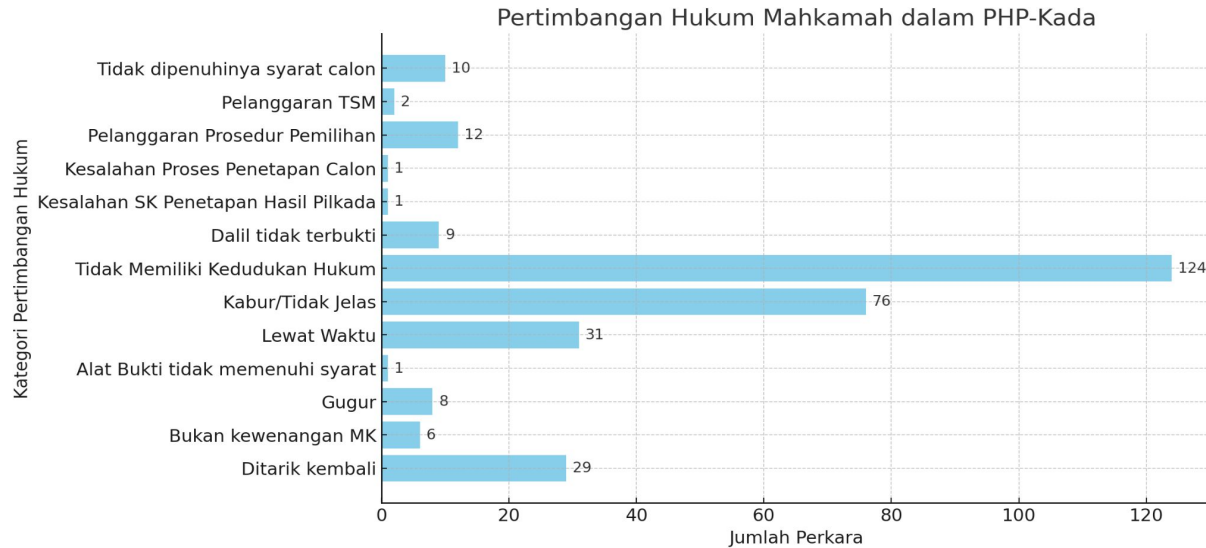
Pilkada	Perintah Mahkamah
Kab. Banggai	PSU di satu atau beberapa kecamatan
Kab. Kepulauan Talaud	PSU di satu atau beberapa kecamatan
Kab. Bengkulu Selatan	PSU di seluruh TPS
Kab. Boven Digoel	PSU di seluruh TPS
Kab. Empat Lawang	PSU di seluruh TPS
Kab. Gorontalo Utara	PSU di seluruh TPS
Kab. Kutai Kartanegara	PSU di seluruh TPS
Kab. Mahakam Ulu	PSU di seluruh TPS
Kab. Parigi Moutong	PSU di seluruh TPS
Kab. Pasaman	PSU di seluruh TPS
Kab. Pesawaran	PSU di seluruh TPS
Kab. Serang	PSU di seluruh TPS
Kab. Tasikmalaya	PSU di seluruh TPS
Kota Palopo	PSU di seluruh TPS
Kota Banjarbaru	PSU di seluruh TPS
Prov. Papua	PSU di seluruh TPS
Kab. Bangka Barat	PSU di TPS tertentu
Kab. Barito Utara	PSU di TPS tertentu
Kab. Bungo	PSU di TPS tertentu
Kab. Buru	PSU di TPS tertentu
Kab. Magetan	PSU di TPS tertentu
Kab. Pulau Taliabu	PSU di TPS tertentu
Kab. Sabang	PSU di TPS tertentu
Kab. Siak	PSU di TPS tertentu

Jumlah daerah yang harus melaksanakan PSU pasca PHP-Kada menjadi yang terbanyak di tahun 2025 ini. Sebanyak 24 daerah akan melaksanakan PSU dan 14 daerah diantaranya melakukan PSU di seluruh TPS. Hal ini jauh meningkat dibandingkan Tahun 2021 yang hanya ada 2 daerah yang melakukan PSU di seluruh TPS

Putusan PHP-Kada 2025 berdasarkan Kategori Pemohon

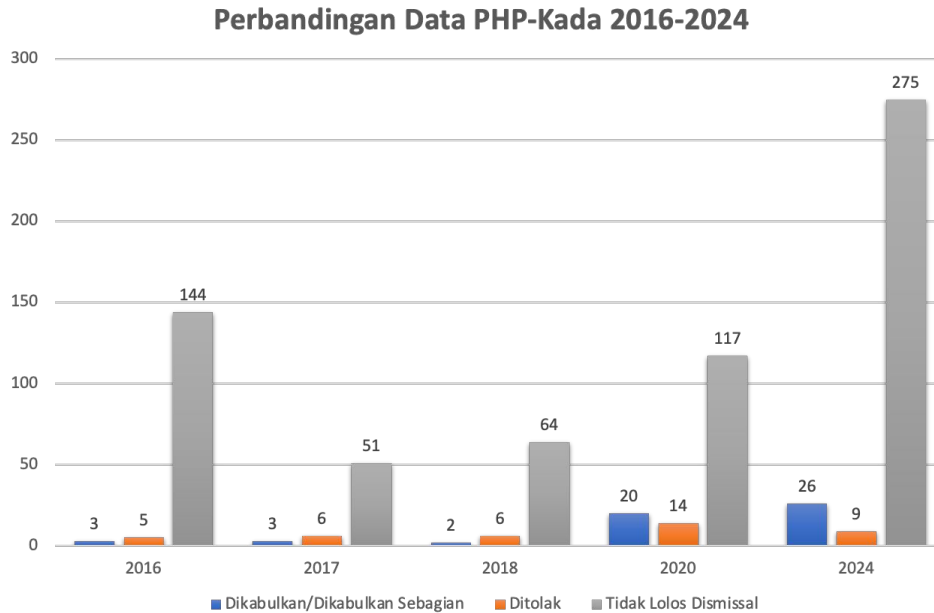


Ragam Pertimbangan Hukum Mahkamah



Berdasarkan hasil analisis putusan PHP-Kada 2025 dan olahan data hasil publikasi MK, Perludem membagi pertimbangan hukum Mahkamah kepada 11 kategori, 5 diantaranya menjadi alasan Mahkamah mengabulkan sebagian dalil pemohon di 26 perkara.

Perbandingan Jumlah Putusan 2016-2024



Jika dibandingkan jumlah perkara yang dikabulkan oleh MK sejak 2016-2024, PHP-Kada tahun 2020 adalah yang memiliki persentase perkara dikabulkan paling tinggi yaitu 13,07%, sementara tahun 2024 menjadi persentase tertinggi kedua dengan 8,38%. Artinya secara persentase ada penurunan grafik perkara yang dikabulkan.


Diskualifikasi di PHP-Kada

Terdapat sebanyak 11 PSU yang disertai dengan diskualifikasi paslon, dengan alasan utama pelanggaran administratif atau masalah kasus hukum.


- Kab. Pasaman
- Kab. Bengkulu Selatan
- Kab. Pesawaran
- Kab. Tasikmalaya
- Kab. Mahakam Ulu
- Kab. Kutai Kartanegara
- Kab. Parigi Moutong
- Kota Palopo
- Kab. Gorontalo Utara
- Kab. Boven Digoel
- Prov. Papua




Peningkatan Jumlah Putusan Diskualifikasi

- Pada pilkada 2020 melalui PHP-Kada 2021 MK untuk pertama kalinya menjatuhkan sanksi diskualifikasi dua pasangan calon di dua daerah berbeda yaitu, Kab. Boven Digoel dan Kab. Sabu Raijua.
 - Pada pilkada 2024 jumlah penjatuhan sanksi diskualifikasi meningkat drastis menjadi 11 daerah. Meskipun sebagian besarnya hanya dijatuhkan kepada salah satu di antara calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah.
 - Tidak dipenuhinya salah satu syarat calon oleh peserta pilkada menjadi alasan sebagian besar sanksi diskualifikasi yang dijatuhkan MK. Syarat mantan narapidana dan pendidikan calon adalah yang mendominasi
 - MK mempertimbangkan prinsip kejujuran untuk dipatuhi
- 


Yurisprudensi dalam Putusan Banjarbaru

- Pemilihan Walikota Banjarbaru menjadi preseden baru dimana dilakukannya diskualifikasi pasangan calon pada waktu kurang dari 29 hari menuju hari pemungutan suara yang menyebabkan pilkada menjadi hanya diikuti satu pasang calon
 - Dalam Putusan MK Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Mahkamah menyatakan keadaan di Banjarbaru merupakan suatu keadaan khusus yang menjadi anomali penyelenggaraan pilkada, khususnya berkaitan dengan pemenuhan hak konstitusional warga negara
 - Mahkamah juga menilai proses penghitungan dan rekapitulasi pilkada Banjarbaru mengandung ketidakpastian, sehingga harus dibatalkan
- 


Dalil TSM dalam PHP-Kada 2025

- Terdapat dua daerah yang diperintahkan oleh MK untuk melakukan PSU dikarenakan kuatnya dugaan telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM.
 - Di Kabupaten Mahakam Ulu, MK menilai telah terjadi pemanfaatan fasilitas dan dana daerah untuk memenangkan paslon nomor urut 3 yang dilakukan oleh Bupati aktif Mahakam Ulu.
 - Di Kabupaten Serang, MK menilai telah terjadi pemberian dukungan yang dilakukan oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal kepada Istrinya yang mencalonkan diri sebagai calon bupati.
 - MK menerima dua dalil TSM ini dan memerintahkan PSU
 - Sanksi diskualifikasi hanya diterapkan di Mahakam Ulu
- 

Penutup

- Putusan PHP-Kada 2025 menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah PSU dan diskualifikasi pasangan calon dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut mengindikasikan dua hal, semakin bermasalahnya pelaksanaan pilkada dan progresifnya MK dalam menegakkan aturan kepemiluan.
 - Tren pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) masih terjadi, dengan kasus di Mahakam Ulu dan Serang
 - Meskipun MK mampu menyelesaikan sengketa dalam batas waktu yang ditentukan, masih ada tantangan dalam pembuktian dan jumlah saksi yang dibatasi.
 - MK harus konsisten terhadap pertimbangan-pertimbangan yang digunakan dalam perkara PHP-Kada 2025 untuk kedepannya
- 

Rekomendasi

- Penegakan hukum pemilu khususnya pada tahapan penyelenggaraan harus dibenahi agar pelanggaran yang bersifat administratif tidak lagi berlarut hingga ke MK
 - Proses verifikasi pendaftaran oleh KPU dan pengawasan oleh Bawaslu harus ditata ulang agar menciptakan kepastian hukum, terutama terkait dengan syarat calon dan pencalonan yang perlu dikonsolidasikan
 - Perbaikan kerangka hukum pemilu mutlak harus dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap setiap aspek penyelenggaraan pemilu dan pilkada tahun 2024
- 



Terima Kasih